

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pendidikan untuk rakyat merupakan program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertraf Internasional (SBI), dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar, dan insentif bagi pendidik PAUD.

Program ini dimaksud untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau, bermutu, berkeadilan dan dapat memberikan keringanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan sekaligus sebagai salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung suksesnya ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, penyelenggaraan program pendidikan untuk rakyat ini diamanatkan secara tegas dalam sistem perundang-undangan . Undang-Undang

Dasar 1945 Amandemen III pasal 31 Ayat 2 mengatakan, “ setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara membiayainya’.

Mengacu pada berbagai kebijakan Nasional dan meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo merumuskan suatu kebijakan di tingkat daerah dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yaitu Program Pendidikan Untuk Rakyat yang di singkat dengan PRODIRA.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 9A Tahun 2012 tentang PRODIRA. Program ini bertujuan menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi warga masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Provinsi Gorontalo sebagai institusi teknis yang betanggung jawab untuk penyelenggaraan program ini. Dengan berbagai bidang-bidang meliputi: 1) penyelenggaraan kurikulum, 2) pemeliharaan dan pengadaan sarana 3) ketenagaan, 4) pembinaan kesiswaan 5) manajemen sekolah / madrasah dalam bentuk kegiatan yang meliputi: 1) meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, 2) meningkatkan layanan pada semua jenjang pendidikan untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan, 3) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,

SMA/SMALB/SMK Negeri/Swasta terhadap biaya operasional satuan pendidikan, kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Dengan di dalamnya mencakup pelaksanaan: 1) Memberikan biaya operasional Sekolah/Madrasa pada jenjang pendidikan menengah (BOS) 2) Memberikan biaya pendidikan mutu pada pendidikan dasar, 3) Menyediakan biaya administrasi kegiatan kabupaten/kota dan administrasi kegiatan provinsi, 4) Menyediakan sasaran RKB SMA/MA dan SMK dan operasional sekolah sepenuhnya 5) Memberikan insentif bagi pendidik PAUD.(JUKNIS PRODIRA 2013:3)

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Gorontalo agar bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan berkeadilan sehingga bias melahirkan sumber daya yang berkualitas kedepan nanti.

Namun kenyataan yang ada sesuai dengan wawancara dan observasi awal penulis baik pada tokoh masyarakat dan orang tua siswa terungkap saat ini masih ada pungutan di sekolah sehingga program ini seakan memberikan harapan yang tidak sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memberikan keringanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu anggaran yang disalurkan oleh DIKPORA tidak sesuai kebutuhan sekolah yang akhirnya menjadi kendala bagi sekolah melaksanakan PRODIRA. Kelemahan yang cukup signifikan juga dalam pelaksanaan program ini kurangnya dalam tingkat komunikasi antara pihak Dinas terkait dan sekolah sehingga banyak menimbulkan persepsi masyarakat yang tidak baik mengenai program terutama dari segi sosialisasi maupun penyelenggaraan program dan tidak ada kejelasan alokasi dana

seberapa banyak anggaran yang harus di pakai di masing-masing program atau ruang lingkup PRODIRA.

Selain itu hasil wawancara awal di DIKPORA, bahwa pengelolaan program ini masih banyak kendala yang dihadapi dari segi perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan kadang tidak sesuai ketika dalam pelaksanaan program di sekolah. Anggaran yang telah direncanakan sebelumnya kadang selalu digunakan tidak pada alokasi sebenarnya, sehingga Dinas terkait pun mengalami kendala dalam memberikan pemahaman kepada pihak sekolah karena memang kebutuhan sekolah tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam kata lain sampai dengan saat ini pengalokasian anggaran program ini belum memenuhi kebutuhan sekolah. Selain itu transparansi sekolah kepada masyarakat mengenai anggaran PRODIRA tidak begitu jelas sehingga DIKPORA selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan konsep PRODIRA yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang :
EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT (PRODIRA) DI PROVINSI GORONTALO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) di Provinsi Gorontalo ?
3. Bagaimana Pengawasan Program pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo ?
4. Bagaimana Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Gambaran Perencanaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo ?
2. Untuk Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo ?
3. Untuk Mengetahui Gambaran Pengawasan Program Pendidikan Untuk Rakyat (DIKPORA) di Provinsi Gorontalo ?
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi DIKPORA agar lebih memahami pengelolaan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA).
2. Bagi Sekolah-Sekolah agar lebih jelas dalam pelaksanaan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA).

3. Bagi masyarakat agar lebih jelas bagaimana penyelenggaraan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA)
4. Bagi penulis adalah dapat mengetahui penyelenggaraan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang baik.